

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI TANAH KARO

(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 275/Pid.B/2018/PN.Kbj)

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, adapun salah satu modus yang sering terjadi adalah pelaku berpura-pura bisa memberikan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus yang dilakukan pelaku dalam melakukan penipuan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa modus yang dilakukan pelaku tindak pidana penipuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Putusan No: 275/Pid.B/2018/PN.Kbj adalah dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa menawarkan kepada korbannya pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan selalu memakai baju seperti pegawai Bank dan tanda pengenal berlogo BNI yang ada fotonya atas nama Suci Media Ashari seolah-olah pelaku merupakan pegawai Bank BNI. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Putusan nomor: 275/Pid.B/2018/PN.Kbj yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa juga barang bukti yang diajukan di persidangan, serta hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan teori atau sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk*) yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci (*keyword*): **Tindak Pidana Penipuan, Kredit Usaha Rakyat**

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT FRAUD (PBC) IN TANAH KARO

(Case Study Decision No: 275 / Pid.B / 2018 / PN.Kbj)

ABSTRACT

One crime that is rampant is a crime of fraud. This is because fraud is not difficult in doing so, only by capitalizing on the ability of someone to convince others through a series of false or fictitious words, promising or giving lure in any form, while one mode that often occurs is the perpetrator pretends to temple can provide a People's Business Credit (PBC) loan.

This study aims to determine the mode of perpetrators in committing fraud and the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of fraud in the People's Business Credit (PBS). The type of research used in this study is normative juridical research which focuses on secondary data sources.

Based on the results of the study it was found that the mode committed by the criminal offender of People's Business Credit (KUR) in Decision No: 275 / Pid.B / 2018 / PN.Kbj was by deception or a series of lies the defendant offered to his victims the People's Business Credit loan (KUR) by always wearing clothes such as Bank employees and BNI logo identification that have a picture in the name of Suci Media Ashari as if the perpetrator is an employee of BNI Bank. The application of criminal law by the Panel of Judges of the Kabanjahe District Court in Decision number: 275 / Pid.B / 2018 / PN.Kbj stating that the defendant was legally and convincingly guilty of perpetually committing fraudulent acts stipulated in Article 378 of the Criminal Code Jo Article 64 paragraph (1) The Criminal Code is correct, it is appropriate and has been based on the facts at the trial, valid evidence in the form of witness testimony and the defendant's testimony as well as the evidence presented at the trial, as well as the judge in imposing a sentence in accordance with the evidentiary theory or system A Criminal Program known as a negative system, which means that the judge may only declare the defendant guilty of a criminal offense if he believes that his conviction is based on legal evidence according to the law.

Keywords : Criminal Act Of Fraud, People's Business Credit